

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Bantuan Sosial atau *bansos* merupakan salah satu upaya bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik secara kesehatan, sosial, ataupun bantuan berupa uang, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing masyarakat yang ada di daerah tersebut Alba et.,al (Dalam Tri 2023). Lalu Menurut Wargadinata (Dalam Eny 2019) Menjelaskan jika kemiskinan merupakan salah satu masalah yang terjadi di kehidupan manusia, perihal kemiskinan itu sendiri dapat dilihat dari bagaimana aspek kehidupan manusia yang terjadi beiringan dengan usianya. Maka dari itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 9 (1) Menjelaskan jika Jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.

Dari hal ini pemerintah membuat program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan yaitu Program Keluarga Harapan yang disingkat menjadi PKH, PKH dibentuk oleh pemerintah pada tahun 2007 dan mulai beroperasi di tahun yang sama (Rahmadila 2023, p, 2). Setelah itu dijelaskan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 1 (1) menjelaskan bahwa PKH merupakan program bantuan sosial yang bersyarat, dan diberikan kepada keluarga yang kurang mampu dan datanya sudah terdaftar dalam program penanganan fakir miskin, setelah itu hasil data akan diolah yang mana warga yang mendaftar akan disebut sebagai KPM atau Keluarga Penerima Manfaat (Irmawati 2023, p, 1).

Program PKH dikenal di ranah Internasional dengan sebutan *Conditional Cash Transfer* (CCT), yang mana PKH berperan untuk mendorong kemandirian para KPM sebagai penerima bantuan sosial, PKH yang merupakan program bantuan sosial bersyarat yang menjadikan KPM mampu memiliki akses dalam memanfaatkan fasilitas/layanan kesehatan dan layanan pendidikan untuk usia sekolah, tidak hanya

itu PKH menyediakan bantuan untuk KPM yang menyandang disabilitas dan lanjut usia dengan tujuan agar mampu mempertahankan kesejahteraan sosial warga KPM (Kementerian Sosial Republik, 2021). Lalu menurut Husnul (Dalam Lestari et al., 2020, p, 231) menjelaskan PKH memiliki kategori untuk KPM yang menerima bantuan sosial PKH yaitu, adanya ibu hamil, adanya balita, dalam keluarga memiliki anak usia sekolah dasar, memiliki anak usia sekolah menengah pertama.

Hal ini menjadikan KPM PKH harus terdaftar dan menghadiri fasilitas dan pendidikan terdekat. Kewajiban PKH untuk mendorong dan memberdayakan KPM untuk melakukan pemeriksaan kesehatan yang berupa pemeriksaan kandungan, pemberian asupan gizi dan imunisasi lalu menimbang berat badan balita dan anak prasekolah. Tidak hanya itu PKH harus memastikan bahwa warga KPM yang sudah menginjak usia sekolah dasar dan menengah dapat diberikan akses pendidikan, dan untuk kesejahteraan sosial dan penyandang disabilitas serta usia lanjut yang dimulai dari usia 60 tahun, hal ini yang menjadi kewajiban PKH untuk memastikan bahwa setiap KPM memenuhi kriteria tersebut.

Keluarga penerima manfaat (KPM) menurut Cahyadi (Dalam Hasanah et al. 2023) menjelaskan jika KPM sangat memerlukan pendampingan sosial dari PKH supaya warga KPM dapat diberdayakan dengan mengikuti berbagai kegiatan pendampingan yang berikan oleh PKH untuk meningkatkan efektivitas dari Program Keluarga Harapan itu sendiri. Setelah itu menurut Setiyowati (2023) menyatakan mengenai cara memberdayakan suatu komunitas ialah *“Empowering the community means striving to improve the dignity and dignity of layers of society who in current conditions are unable to escape the trap of poverty and backwardness. Empowerment is an effort to build that power, by encouraging, motivating, and raising awareness of its potential and trying to develop it”*. (hlm. 852), yang dimaksud dalam pernyataan tersebut ialah pemberdayaan komunitas merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas diri dalam sosial. Tidak hanya itu pemberdayaan dalam komunitas sendiri dapat membantu para warga yang terjebak dalam kemunduran dan kemiskinan, setelah itu pemberdayaan juga membantu membangun kepercayaan diri, memotivasi, serta meningkatkan kesadaran akan potensial diri dan terus mengasah kemampuan yang dimiliki oleh anggota komunitas tersebut.

PKH memberikan Kegiatan pemberdayaan manusia kepada warga KPM, menurut Swanson et al., (2001) (Dalam Kaswan 2015, p,11) menjelaskan bahwa tujuan adanya pemberdayaan sumberdaya manusia berfokus pada memajukan manusia untuk mencapai kesuksesan secara bersama, baik kesuksesan pribadi maupun kesuksesan organisasi, dan pemberdayaan sumberdaya manusia memiliki dua tema inti yang perlu diketahui yaitu (1) pembelajaran individu dan organisasi, dan (2) kinerja individu dan organisasi. Setelah itu dalam berorganisasi menurut Hendriani et al., (2023) menjelaskan jika dalam berorganisasi memiliki suatu faktor yang merupakan masalah utama di dalam kegiatan suatu organisasi, yang nantinya dapat dikoordinasikan secara sadar dengan batasan yang dapat diidentifikasi dengan tujuan untuk melakukan peningkatan kinerja para anggotanya, baik dengan peningkatan secara komunikasi, keterampilan *soft skill* yang masing-masing anggota miliki agar organisasi tersebut dapat mencapai tujuan mereka.

PKH memiliki suatu gerakan *pilot project* untuk mendampingi para warga KPM yaitu kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2), dan hasil pencapaiannya ini diukur berdasarkan seberapa jauh proses yang dihasilkan selama kegiatan P2K2 dilakukan oleh warga KPM, dan kegiatan P2K2 ini ditujukan untuk meningkatkan rasa kesadaran, pengetahuan, keterampilan yang dapat membantu dan mengubah kehidupan warga KPM menjadi lebih sejahtera (Agusrini et al., 2022). Karena berdasarkan profil kemiskinan Kota Tasikmalaya tahun 2024 menjelaskan jika pada bulan maret 2024 terdapat 76,71 ribu penduduk warga miskin di Kota Tasikmalaya, yang berarti 11,10% dikategorikan sebagai penduduk miskin. Kemudian garis kemiskinan yang ada di Kota Tasikmalaya dalam tahun 2024 adalah Rp. 565.377 per kapita perbulanya, setelah itu indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1,35(P1), dan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,2 (P2) (Badan Pusat Statistik Tasikmalaya, 2024).

Dengan adanya program P2K2 yang bertujuan untuk melakukan pembangunan sosial yang mana didefinisikan dengan suatu proses perubahan yang terencana dalam segi sosial, supaya mampu meningkatkan taraf kehidupan secara keseluruhan dalam masyarakat. Dan salah satu strategi pembangunan sosial merupakan investasi dalam pengembangan sumberdaya manusia, pembangunan ekonomi sosialnya, serta pembangunan sosial, Midgley (dalam Triano & Machdum, 2023, p, 507). Yang mana

upaya memberdayakan masyarakat merupakan suatu proses untuk memandirikan masyarakat sehingga mereka mampu menempatkan diri mereka secara proposional. Proses tersebut menempatkan masyarakat untuk menjadi pusat pengembangan (Safyuddin et al., 2017, p, 6).

P2K2 memiliki beberapa modul seperti modul (1) Pengasuhan dan pendidikan anak, (2) pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, (3) kesehatan gizi, (4) perlindungan anak, (5) kesejahteraan sosial lansia dan disabilitas, dan (6) *Stunting*. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah modul P2K2 yang membahas mengenai pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Berdasarkan modul menurut Kemensos, (2018) menjelaskan jika kebutuhan modul tersebut dalam kegiatan P2K2 ditujukan untuk KPM supaya memiliki pengetahuan dasar mengenai bagaimana cara mengelola keuangan, baik itu pendapatan dan pengeluaran, dan mampu untuk merencanakan suatu usaha.

Hasil dari kegiatan P2K2 pada pengelolaan keuangan memiliki dampak bagi KPM atau keluarga inti seperti ayah, ibu, dan anak-anak akan pentingnya tindakan pengelolaan keuangan secara menyeluruh agar mampu mengontrol pendapatan dan pengeluaran bagi keluarga tersebut supaya dapat ditingkatkan secara maksimal Rushadiyati et.,al (Dalam Akbar & Sutoyo, 2022, p, 127). Maka dari itu dengan adanya permasalahan ini dilakukan penelitian untuk warga KPM di daerah kecamatan Cibeureum Tasikmalaya, bersama PKH Cibeureum untuk meneliti bagaimana jalannya kegiatan P2K2 bagian pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Setelah itu berdasarkan hasil kegiatan FKIP-EDU yang dilakukan selama 4 bulan yang dimulai dari bulan februari hingga juni 2024, selama kegiatan berjalan peneliti mengikuti serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh PKH yang salah satunya ada kegiatan P2K2 yang membahas mengenai pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha.

Kejadian formalitas dalam kegiatan P2K2 sering pula terjadi menurut Firmansyah (2023) menjelaskan bahwa formalitas dalam kegiatan P2K2 masih sering terjadi karena dengan adanya mekanisme yang sudah diterapkan, tetapi masih ada perbedaan yang terjadi baik antara modul dan pelaksanaannya, dan hal inilah yang menyebabkan formalitas itu terjadi dengan tujuan untuk hanya untuk menunjukkan bahwa warga KPM sudah mengikuti kegiatan P2K2 tanpa memahami secara baik

atau mampu menyelesaikan masalah yang mereka miliki. Kemudian warga KPM perlu memahami pentingnya *priority scaling* untuk menghadapi keadaan ekonomi yang sedang mereka hadapi karena menurut Tahiroğlu & Aktepe, (2014) menjelaskan mengenai perubahan kondisi perekonomian yang mana, “*societies were undergoing through changes between social and economic fields, we can witness it by how many conflicts of feeling, thought, and values about financials, and also families should adapt on how to change their lifestyle or their value systems.*” Yang dimaksud dalam penjelasan tersebut ialah masyarakat sedang melalui beberapa perubahan dari segi sosial dan ekonomi, dari hal ini kita dapat melihat banyaknya konflik yang terjadi dalam diri sendiri, pemikiran, pendirian, serta masalah ekonomi, begitupula dengan permasalahan keluarga. Hal ini menjelaskan bahwa KPM perlu beradaptasi dan mampu memutuskan kepentingan apa yang mereka dapat jadikan sebagai prioritas dalam perekonomian mereka.

Dari hal ini peneliti melakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi materi P2K2 secara bertahap. Karena pada dasarnya dengan adanya kegiatan pemberdayaan KPM dalam bidang pengelolaan keuangan keluarga yang akan membuat pemahaman mereka akan literasi keuangan semakin meningkat, yang mana nantinya warga KPM mampu mengakses dan memilih produk maupun jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan yang didasari atas kebutuhan penting mereka (Abdul, 2024, p, 125).

Dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul “Implementasi Modul Pengelolaan Keuangan Dalam Kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bagi Kelompok Penerima Manfaat” studi pada Program Keluarga Harapan (PKH) Kelurahan Awipari, Kota Tasikmalaya. Maka dari itu yang diharapkan dari penelitian ini ialah para KPM mampu mengimplementasikan ilmu P2K2 mengenai pengelolaan keuangan secara bertahap dan menunjukkan peningkatan, dan mengetahui pentingnya literasi keuangan pada kondisi ekonomi yang sedang dialami oleh KPM.

1. 2. Identifikasi Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah di atas, dapat dijabarkan identifikasi masalahnya yakni:

- 2.1. Masih banyaknya warga KPM yang mengikuti kegiatan pemberdayaan P2K2 hanya karena keharusan sebagai warga KPM, dan tidak benar-benar diterapkan ilmunya didalam kehidupan kesehariannya,
- 2.2. Dengan adanya fenomena “formalitas” menjadikan warga KPM yang mendapat bantuan sosial PKH hanya mengikuti kegiatan P2K2 kurang maksimal,
- 2.3. Pendamping PKH harus sering melakukan penyuluhan mengenai skala prioritas kebutuhan bagi para warga KPM,
- 2.4. Efektivitas penerapan materi modul P2K2 pengelolaan keuangan digunakan untuk menghadapi kehidupan sehari-hari bagi warga KPM
- 2.5. Perlunya pendampingan lebih intensif dan dilakukan secara berkala agar warga KPM mampu berkonsultasi masalah ekonominya.

1. 3. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang dan Identifikasi masalah yang telah diberikan diatas, penelitian ini berfokus pada masalah mengenai bagaimana implementasi program P2K2 mengenai modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, sudah diterapkan oleh warga KPM dengan baik?

1. 4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menemukan jawaban atau hasil dari penelitian terhadap masalah yang sudah dijelaskan pada bagian rumusan masalah untuk mengetahui hasil implementasi dari materi P2K2 mengenai modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha bagi warga KPM.

1. 5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut:

5.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan, informasi, wawasan, serta kajian mengenai keilmuan pendidikan masyarakat dalam pemberdayaan sumber daya manusia, mengenai implementasi kegiatan P2K2 dalam modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Setelah itu

hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan maupun referensi bagi penelitian selanjutnya.

5.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Mengetahui hasil realita yang didapatkan mengenai bagaimana kegiatan P2K2 mengenai pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha dilakukan berdasarkan modul yang dimiliki oleh PKH, apakah implementasi dari materi yang diberikan oleh PKH sudah diterapkan secara bertahap atau belum dilakukan sama sekali.

b. Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Memperluas wawasan mengenai *money literacy* yang didasari oleh materi modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, sehingga mereka mampu untuk menjadi lebih bijak dalam menggunakan uang mereka sesuai kebutuhan.

c. Bagi Program Keluarga Harapan (PKH)

Menambah wawasan para pendamping PKH untuk terus memberikan bimbingan secara intensif mengenai pentingnya pengaturan keuangan dalam keluarga, sehingga para KPM mampu untuk meningkatkan kualitas kehidupannya secara bertahap.

5.3. Manfaat Empiris

Penelitian ini diharapkan mampu dan berguna bagi referensi untuk lembaga maupun para peneliti yang lain, dan juga sebagai bahan acuan untuk selalu meningkatkan *awareness* terkait implementasi dari hasil P2K2 pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha.

1. 6. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penafsiran atau pemaknaan suatu istilah, untuk menghindari potensi kesalahpahaman yang tidak tepat oleh pembaca, definisi operasional bertujuan untuk memberikan klarifikasi. Dengan demikian peneliti menjelaskan secara rinci beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Implementasi P2K2 Pengelolaan Keuangan

Implementasi P2K2 pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha merupakan penerapan dari modul tersebut bagi kehidupan warga KPM supaya

mereka mampu menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi terkait ekonomi, dan mereka mampu menerapkan materi-materi yang berkaitan dengan keuangan di kehidupan mereka. Setelah itu dengan implementasi ini ditujukan untuk para warga KPM meningkatkan kemampuan literasi keuangan yang diajari di lingkungan keluarga. Dengan pengelolaan keuangan yang tepat, dan ditunjang dengan kemampuan literasi ekonomi yang baik maka taraf hidup masyarakat KPM diharapkan meningkat, kemudian warga KPM kecamatan Cibeureum khususnya Kelurahan Awipari, proses implementasi program P2K2 pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha dilihat dari bagaimana keluarga mampu menerapkan modul tersebut kedalam pengaturan keuangan keluarga mereka, seberapa mampu mereka untuk menabung, dan apakah uang tersebut dapat dijadikan suatu usaha.

2) Modul Pengelolaan Keuangan

Yang dimaksud dari modul ini ialah merupakan suatu media yang digunakan oleh pendamping PKH untuk memberikan materinya pada kegiatan P2K2. Supaya materi yang diberikan kepada KPM sesuai dengan kapasitas yang warga KPM dapat lakukan. Sehingga modul ini digunakan sebagai *guide* yang digunakan oleh PKH untuk memberikan materi secara terarah dan teratur. Kemudian modul ini ditujukan kepada rumah tangga miskin untuk memberikan mereka pengetahuan dasar, dan mengasah keterampilan dalam mengelola pendapat dasar dan mengasah keterampilan dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran, serta merencanakan usaha. Tetapi dalam modul dijelaskan juga bawasannya pengetahuan dasar yang diberikan tidak akan menyelesaikan semua masalah keuangan yang dihadapi peserta, tetapi dapat membantu warga KPM untuk mengurangi permasalahan terkait keuangan secara bertahap.

3) Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

P2K2 merupakan proses belajar dengan terstruktur untuk memperkuat sikap-sikap KPM yang sudah terjadi perubahan perilaku pada KPM, kemudian P2K2 merupakan kegiatan pemberdayaan manusia dalam ruang lingkup keluarga penerima manfaat sebagai salah satu syarat penerima bansos PKH untuk mengikuti kegiatan P2K2 yang bertujuan agar warga KPM dapat segera graduasi dan lebih berdaya secara kehidupan. P2K2 memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan

keuangan. P2K2 juga merupakan *pilot project* PKH yang mengukur seberapa jauh terjadinya proses belajar warga KPM yang mampu menumbuhkan kesadaran (sikap), pengetahuan dan keterampilan baru bertujuan untuk merubah kelompok dampingannya ke arah kegiatan dan kehidupan yang lebih mensejahterahkan KPM dampingannya masing-masing.

4) Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Keluarga Penerima Manfaat merupakan keluarga yang menerima bantuan sosial PKH. Mereka diberikan bantuan tersebut dengan tujuan agar mereka mampu memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah terkait, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Tetapi untuk *menerima* bantuan sosial PKH yang tentunya bansos PKH merupakan bansos yang bersyarat, dan warga KPM harus mengikuti kegiatan pemberdayaan yang diberikan oleh PKH agar mereka mampu graduasi